



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	4
Ringkasan Eksekutif.....	5
BAB I Pendahuluan.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Gambaran Umum Organisasi.....	9
1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Umum.....	12
BAB II Perencanaan Kinerja.....	13
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
2.3. Rencana Anggaran.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	52
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	52
3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	52
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	57
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	63
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	65
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	67
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	73
3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	75
3.2. Realisasi Anggaran.....	79

BAB IV. Penutup.....	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	81
BAB V. Lampiran	82
1. Perjanjian Kinerja	82
2. Lain -Lain	82

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, 27 Februari 2026

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Ir. Sussy Rahayu Agustini, M.T
NIP. 19680820 199503 2002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perbup Nomor 8 Tahun 2022 diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2022 pasal 3 diantaranya:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator, dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 1 (satu) sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB dengan indikator Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi, Kategori Kabupaten Layak Anak dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) .

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah tercapai dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 98,24%. capaian indikator Kabupaten Layak Anak tidak mencapai target sehingga capaian indikator kinerja sasaran belum mencapai 100,00 %.

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 53.544.633.638 atau 98,95 % dari target anggaran sebesar Rp. 54.111.644.950 dengan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 115,45 %, rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00 % dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 94,48% %.

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025.

LKIP merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai bentuk kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 kepada Bupati Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 berisi pencapaian indikator sasaran selama tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini menyajikan informasi mengenai analisis sasaran strategis pencapaian kinerja (membandingkan antara capaian dan target),

permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis di DP3AP2KB tahun 2025 adalah meningkatkan Kepesertaan KB dalam upaya pencegahan Stunting dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor, sehingga mendorong DP3AP2KB untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk mendukung tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja mendatang.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas Pokok

Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tugas Pembantuan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;
5. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

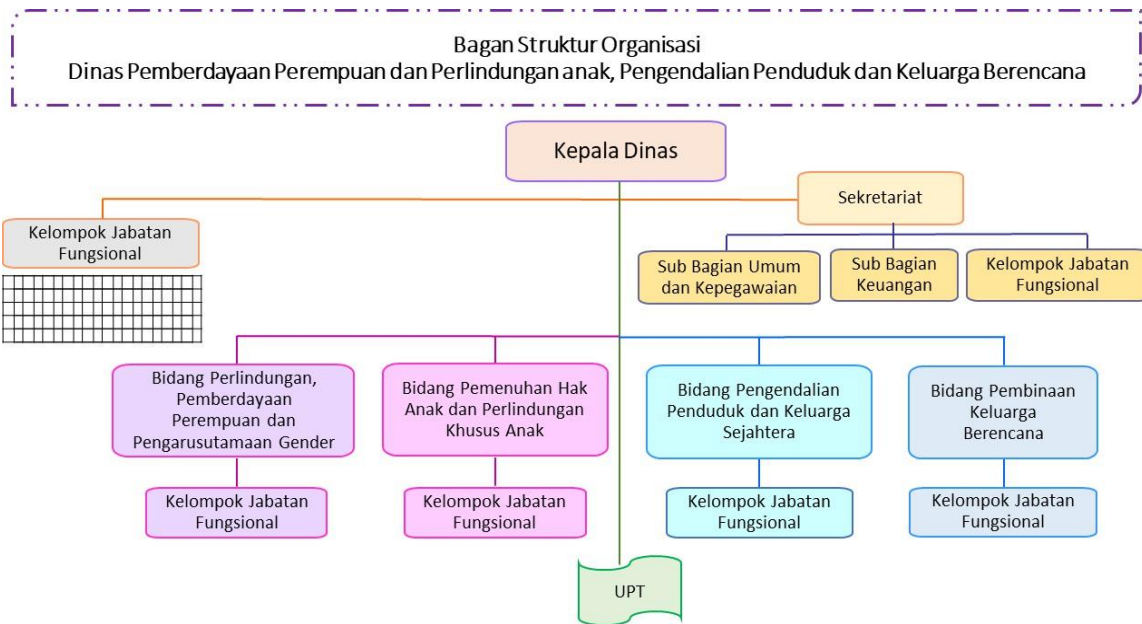
C. Struktur Organisasi

Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

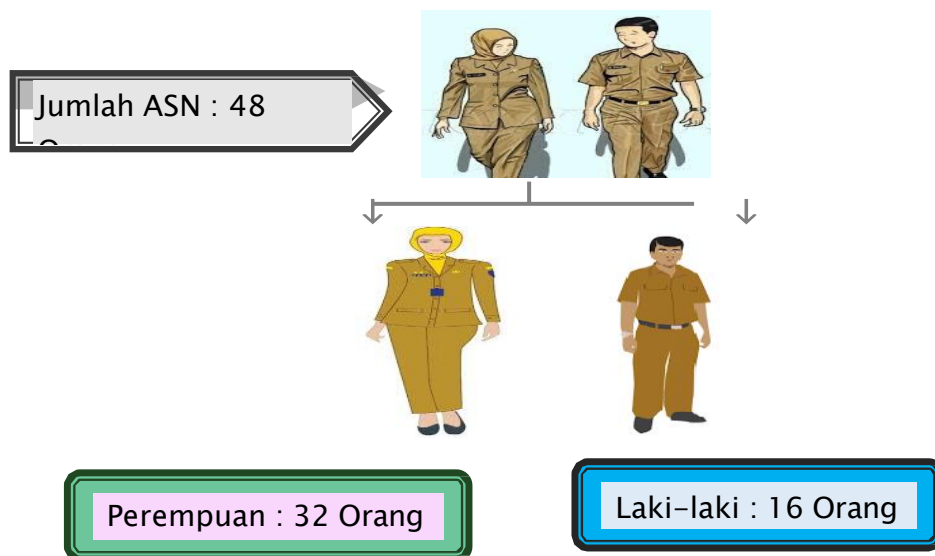
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional : Sub Koordinator Program dan pelaporan

- c. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
 - 2. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
 - 2. Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 3. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga
- f. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, membawahkan : Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
 - 2. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 3. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap susunan dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor digambarkan berdasarkan Peraturan bupati Nomor 8 tahun 2022.



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tugas Pembantuan adalah sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah pegawai aparatur sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor pada tahun 2025 adalah sebanyak 48 orang terdiri dari ASN Perempuan 32 orang dan ASN Laki-laki 16 Orang.



1.5. Isu Strategi dan Permasalahan Umum

Adapun isu Isu Strategi dan Permasalahan Umum yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

A. Isu Strategi

- Kesetaraan Gender
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Kepala Keluarga
- Pemenuhan Hak Anak
- Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
- Fungsi Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting

B. Permasalahan Umum

1. Belum terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum Optimalnya Layanan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak
4. Belum Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif, Khususnya Yang Dikelola Perempuan
5. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak
6. Belum Optimalnya Kesadaran Keluarga untuk ber-KB
7. Belum Optimalnya Pemahaman Keluarga tentang Fungsi Keluarga
8. Belum Optimalnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

BAB II PERENCANAAN KINERJA

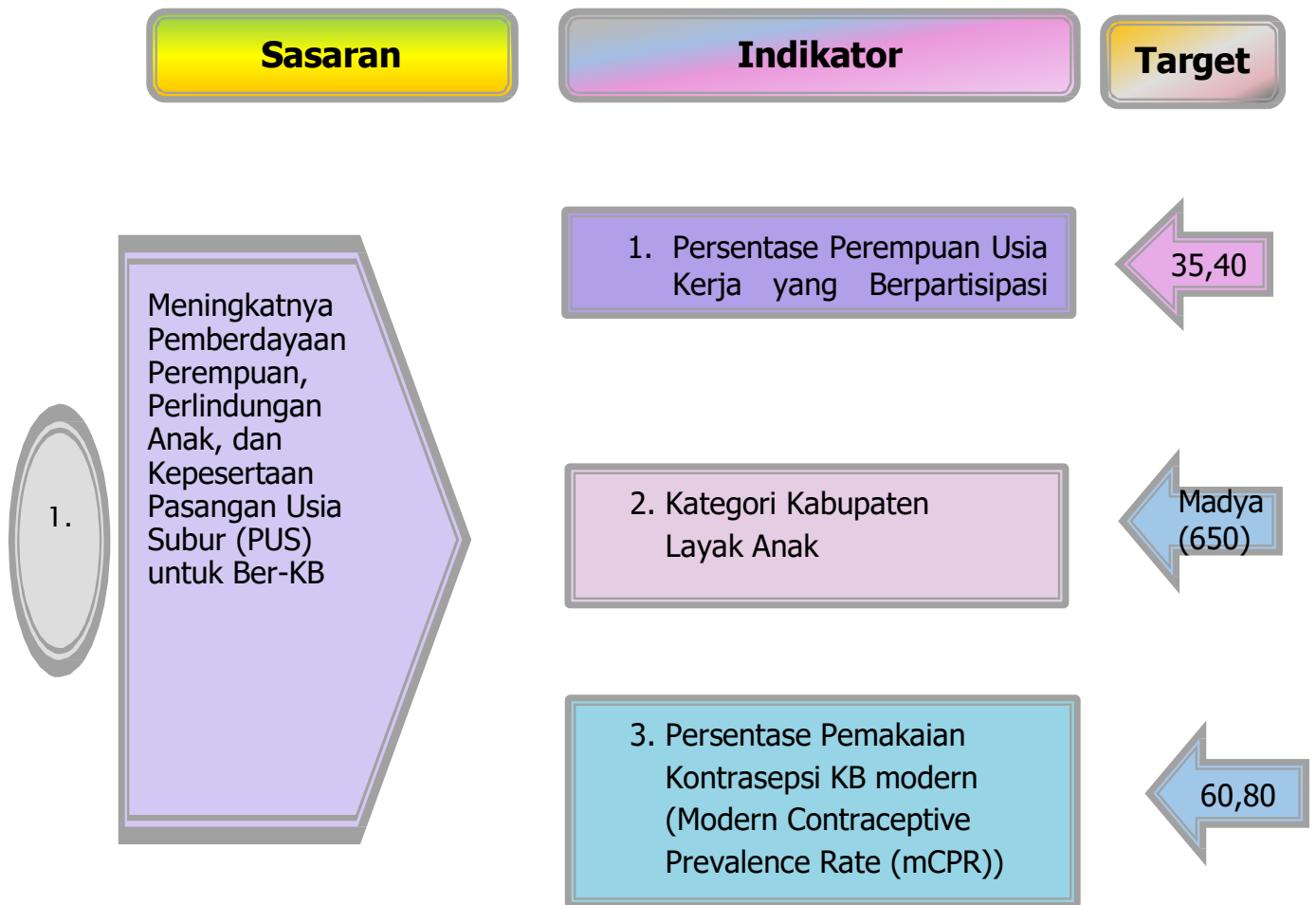
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025. Rencana Strategis (RENSTRA) DP3AP2KB mengacu pada RPD Kabupaten Bogor tahun 2025 – 2029 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders.



2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2025 -2029

Sasaran	Indikator	TARGET		
		2026	2026	2027
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB	1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	35,40	35,93	36,47
	2. Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya
		650	675	700
	3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	60,80	61,60	62,30

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan			1	233.900.318	1	240.595.646	1	147.625.428	1	155.006.700	1	162.757.034
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG ditingkat provinsi	Kebijakan			3	500.000.000	4	205.250.000	4	215.512.500	4	226.288.125	4	237.602.531
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			2	499.999.625	2	510.000.000	2	520.000.000	2	530.000.000	2	540.000.000
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga					2	256.595.000	2	269.424.750	2	282.895.988	2	297.040.787

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%			60,00	692.056.748	50,00	615.834.168	80,00	646.625.876	90,00	678.957.170	90,00	712.905.029
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang			200	222.381.723	200	136.158.964	150	142.966.912	150	150.115.258	150	157.621.021

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang			60	469.675.025	63	479.675.204	66	503.658.964	69	528.841.912	72	555.284.008
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	75,00	643.520.190	77,00	1.983.402.050	78,00	1.916.821.264	79,00	2.034.659.817	80,00	2.123.855.928	81,00	2.297.561.567
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	2	624.999.150										
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	18.521.040										
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			4	750.000.000	4	621.749.112	4	674.834.056	4	696.038.880	4	911.629.688

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang			120	399.999.900	63	419.999.895	66	440.999.890	69	463.049.884	72	486.202.378
Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga			1	833.402.150	1	875.072.257	1	918.825.871	1	964.767.164	1	899.729.501

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	16,78	220.241.110	33,56	4.311.499.452	50,34	3.609.380.551	67,13	2.310.243.759	83,91	2.348.866.487	100,00	2.413.077.253
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	24,05	119.474.110	27,49	3.363.040.650	23,51	3.209.546.686	19,17	1.409.680.111	18,81	1.400.261.657	20,43	1.436.559.182
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	119.474.110										
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			1500	3.363.040.650	1000	3.209.546.686	350	1.409.680.111	350	1.400.261.657	350	1.436.559.182

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	%	10,18	64.767.000	25,05	767.226.326	14,29	261.233.865	24,27	755.033.648	25,24	795.798.330	25,64	816.071.246
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	64.767.000										
Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			43	181.232.376	38	138.600.000	23	139.740.000	31	149.740.000	22	137.710.000
Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga			85	585.993.950	35	122.633.865	101	615.293.648	98	646.058.330	109	678.361.246

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	%	8,41	36.000.000	13,70	181.232.476	22,11	138.600.000	22,70	145.530.000	23,87	152.806.500	25,44	160.446.825
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	144	36.000.000										
Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang			11000	181.232.476	8000	138.600.000	9000	145.530.000	10000	152.806.500	10000	160.446.825
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	58,35	182.230.634	59,15	1.152.195.829	59,85	1.187.951.160	60,45	1.311.061.095	60,95	1.449.348.517	61,35	1.635.480.158

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	81.222.934										
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			3	100.462.075	5	110.508.283	5	121.559.111	5	133.715.022	7	149.760.825

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			72	369.983.125	72	356.462.103	75	396.423.132	75	430.904.824	80	498.694.830
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			1	509.997.243	1	560.996.967	1	617.096.664	1	691.148.264	1	774.086.055
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100,00	93.153.550	100,00	171.753.386	100,00	159.983.807	100,00	175.982.188	100,00	193.580.407	100,00	212.938.448

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang			50	171.753.386	65	159.983.807	80	175.982.188	95	193.580.407	100	212.938.448
				1.303.565.014		3.633.733.751		2.751.390.764		3.007.355.400		3.258.091.227		3.598.264.088
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	953.370.964	100,00	1.856.648.743	100,00	1.705.306.760	100,00	1.886.971.238	100,00	2.057.492.303	100,00	2.311.020.108
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	13,95	62.933.014	19,38	956.648.743	29,07	1.052.313.617	38,76	1.157.544.980	48,45	1.264.138.446	58,14	1.380.749.988

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu	Kegiatan	2	62.933.014										
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen			1	252.369.993	1	277.606.992	1	305.367.692	1	326.743.430	1	349.615.470
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan			1	344.278.800	1	378.706.680	1	416.577.348	1	458.235.083	1	504.058.591
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang			100	359.999.950	105	395.999.945	110	435.599.940	116	479.159.933	121	527.075.927

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	100	37.806.475										
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen												
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			1	900.000.000	2	652.993.143	2	729.426.258	2	793.353.857	2	930.270.120

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	8	1.881.000										
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	159.475.275	100	112.527.781	100	123.780.560	100	136.158.616	100	149.774.478
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	574.954.308	100	90.500.000	100	99.550.000	100	109.505.000	100	120.455.500

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggo)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	8	1.881.000										
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	43.641.725	100	162.488.480	100	178.737.328	100	196.611.060	100	216.272.166
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	396.713.850	100	74.402.900	100	81.843.190	160	90.027.509	165	99.030.260

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	30	11.018.000										
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	187.069.850	100	196.423.343	100	206.244.509	105	216.556.735	110	227.384.572
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			100	415.230.000	100	409.741.500	100	430.228.575	105	451.740.004	110	474.327.004

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,00	974.811.178	100,00	1.259.073.248	100,00	404.541.095	100,00	540.947.040	100,00	489.144.129	100,00	654.302.807
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	72.600.000	2	75.000.000	2	80.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	42.367.610	2	97.278.025	2	56.541.095	2	69.900.000	2	74.144.129	2	89.302.807
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	486.600.000	1	556.522.425	1	98.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	140.000.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	2	324.740.784	13	386.710.143	13	120.000.000	13	125.000.000	13	125.000.000	13	135.000.000
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan							1	30.000.000			1	40.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	1	8.292.500	1	23.584.550	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	5	52.810.284	5	134.978.105	5	25.000.000	10	63.447.040	6	30.000.000	15	80.000.000
Penyusunan Profil program pembangunan keluarga kependudukan dan KB (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Profil program pembangunan keluarga kependudukan dna KB (Bangga Kencana)	Laporan					1	20.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,80	9.612.330.868	14,20	9.144.546.365	13,70	11.864.466.471	13,20	10.141.513.541	12,80	11.131.625.261	12,30	12.435.300.704
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	1.198.373.600	100,00	1.369.020.000	100,00	1.484.020.000	100,00	1.250.000.000	100,00	1.325.000.000	100,00	1.400.000.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	321.300.000	1	321.300.000	1	340.300.000	1	150000000	1	150.000.000	1	150.000.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	399.000.000	1	399.000.000	1	410.000.000	1	300000000	1	300.000.000	1	300.000.000
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	129.353.600	1	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	248.720.000	80	248.720.000	80	258.720.000	80	250000000	80	250.000.000	80	250.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	4.669.378.960	100,00	5.757.490.562	100,00	6.415.446.471	100,00	5.290.513.541	100,00	5.783.025.261	100,00	6.554.340.704

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	435	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.750.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	102.759.296	3	514.173.250	3	420.000.000	3	462.000.000	3	508.200.000	3	559.020.000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	2.826.619.664	3	3.503.317.312	3	4.245.446.471	3	3.088.513.541	3	3.534.825.261	3	4.255.320.704
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%	29,91	3.274.532.000	30,21	1.297.921.627	30,51	805.000.000	30,82	825.000.000	31,12	900.000.000	31,42	975.000.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	3	470.046.308	12	720.114.176	101	3.160.000.000	103	2.776.000.000	103	3.123.600.000	113	3.505.960.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	%	3,65	26.217.024.843	4,05	8.513.485.501	4,12	18.730.855.896	4,19	19.707.356.948	4,26	20.612.474.073	4,29	21.937.043.997
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	65,68	2.380.828.143	66,31	2.368.026.736	67,28	2.444.013.280	68,26	2.540.254.608	73,38	2.653.280.070	75,33	2.737.608.076
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	9.600.000	1	9.900.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	1.817.364.825	2	453.236.175	2	465.000.000	2	474.400.000	2	499.400.000	2	514.400.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	15	204.715.100	23	107.661.425	15	118.413.280	15	130.254.608	15	143.280.070	15	157.608.076
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	750	171.375.000	738	790.500.525	750	800.000.000	750	825.000.000	750	850.000.000	750	875.000.000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	79.803.350	1	458.142.500	3	475.000.000	3	500.000.000	3	525.000.000	3	550.000.000

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	7	97.969.868	23	548.586.111	23	575.000.000	23	600.000.000	23	625.000.000	23	630.000.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	33,33	23.836.196.700	33,33	6.145.458.765	66,67	16.286.842.616	100,00	17.167.102.340	100,00	17.959.194.003	100,00	19.199.435.921
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	15.896.700										
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	8.775.900.000	1	3.194.616.700	1	8.856.933.370	1	9.365.697.632	1	9.767.719.060	1	10.598.387.230

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	15.044.400.000	1	2.716.607.100	1	7.388.267.973	1	7.757.681.372	1	8.145.565.440	1	8.552.843.712
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan			2	234.234.965	2	41.641.273	2	43.723.336	2	45.909.503	2	48.204.979

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB

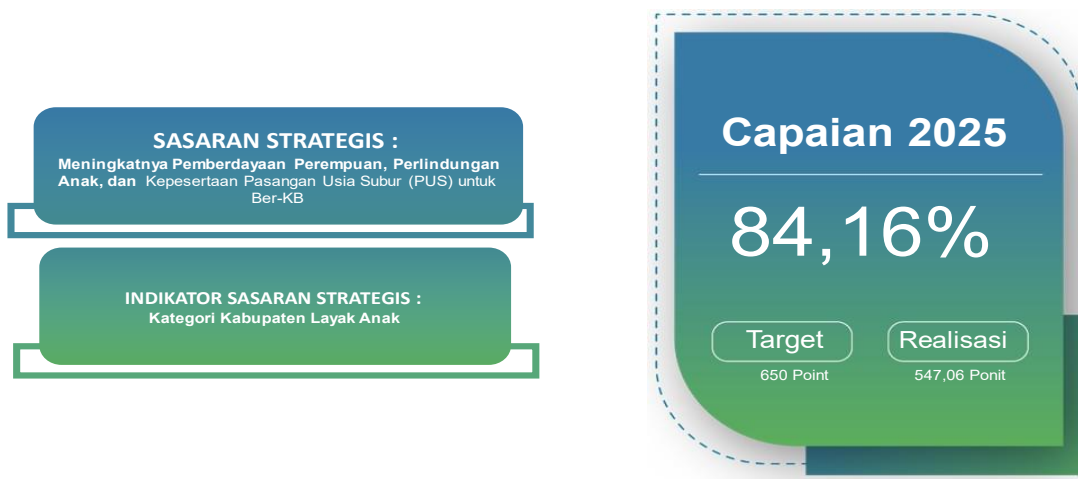
1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi



Pemerintah Kabupaten Bogor sangat berperan dalam meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi. Capaian kinerja Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi tahun 2025 sebesar 106,44 % dari target sebesar 35,40 %, dan terealisasi sebesar 37,68 %.

Keberhasilan Program Bangga Kencana di Kabupaten Bogor yang sangat baik juga bisa dilihat dari **Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi**. Capaian kinerja dari **Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi** Kabupaten Bogor telah melebihi Target yaitu sebesar **106,44%** dengan target sebesar **35,40 %** dan terealisasi sebesar **37,68 %**. Realisasi **Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi** sebesar **37,68 %**. artinya dari 100 orang perempuan yang masuk kedalam kategori angkatan kerja sebanyak 37 orang diantaranya aktif di pasar kerja.

2. Kategori Kabupaten Layak Anak



Kategori Kabupaten Layak Anak masuk dalam kategori Pratama tidak memenuhi target kategori Madya dengan skor 650 hal ini dapat dilihat dari nilai skor hasil penilaian Kabupaten Layak Anak yaitu 547,06

Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB. Hal ini ditandai Capaian Kategori Kabupaten Layak Anak hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 84,16% dari target sebesar 650 Point dan terealisasi sebesar 547,06 Point. Realisasi Kategori Kabupaten Layak Anak sebesar 547,06 Point artinya belum semua dimensi penilaian Kabupaten Layak Anak mencapai target di antaranya adalah dimensi Hak Sipil dan Kebebasan serta dimensi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))



Pemerintah Kabupaten Bogor semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang ingin berKB dengan menyediakan pelayanan KB di seluruh Fasilitas Kesehatan. Capaian kinerja Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) tahun 2025 sebesar 104,11, % dari target sebesar 60,80 % dan terealisasi sebesar 63,30 %

Keberhasilan Program Bangga Kencana di Kabupaten Bogor yang sangat baik juga bisa dilihat dari **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))**. Capaian kinerja **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))** Kabupaten Bogor telah melebihi Target yaitu sebesar **104,11%** dengan target sebesar **60,80 %** tahun dan terealisasi sebesar **63,30 %**. Realisasi **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))** sebesar **63,30 %** artinya sebanyak 63,30 persen PUS di Kabupaten Bogor sedang menggunakan metode kontrasepsi modern.

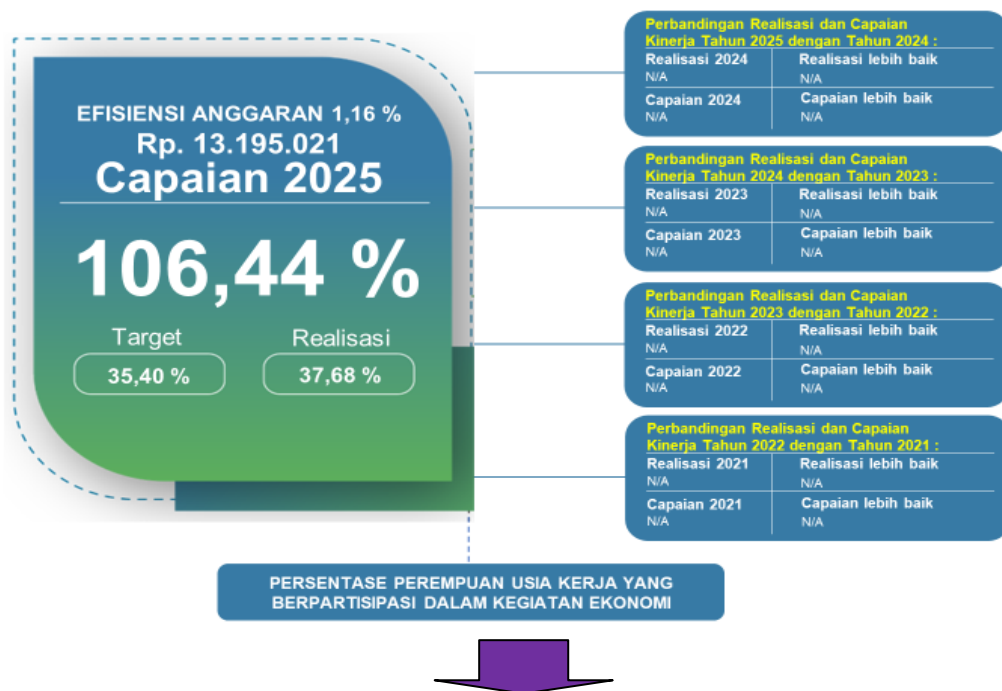
Tabel Capaian Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB	1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi	35,40	37,68	106,44
	2. Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya (650,00)	Pratama (547,06)	84,16
	3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	60,80	63,30	104,11

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

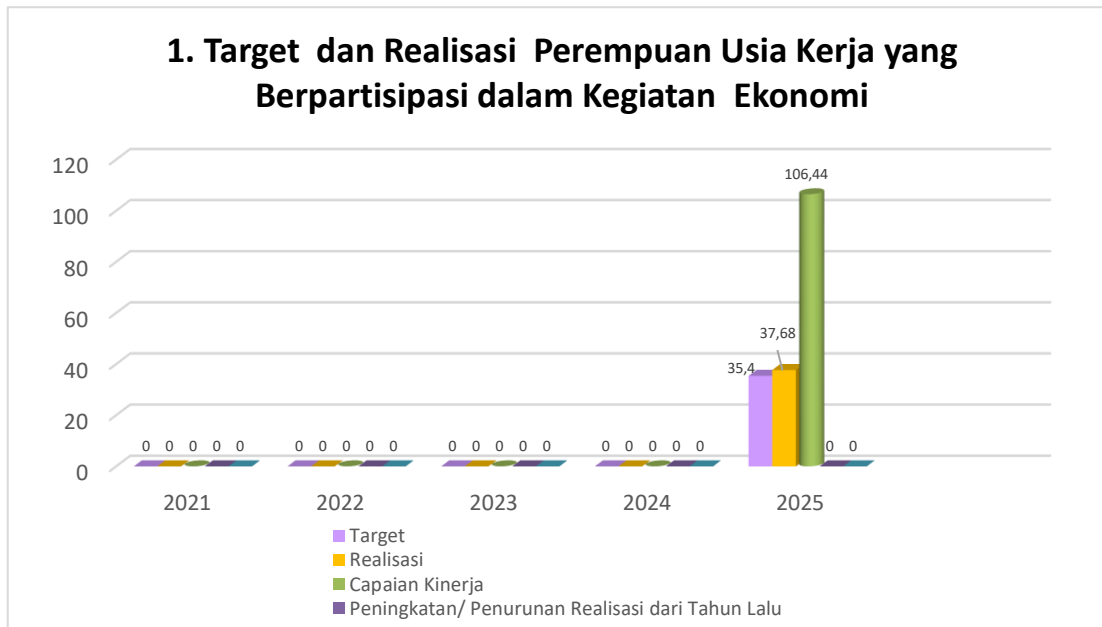
Sasaran: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB

1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi



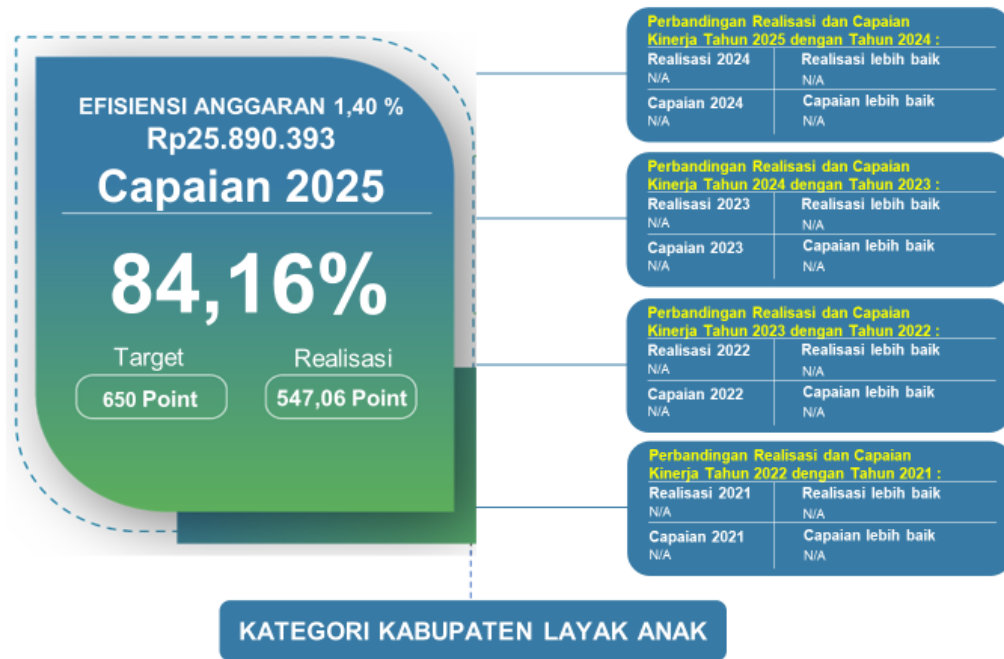
Dari segi realisasi, Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi tidak menjadi indikator sasaran. Dilihat dari Capaian kinerja Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi tahun 2025 naik sebesar 106,44 % dari target sebesar 35,40 %, dan terealisasi sebesar 37,68 %.

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Target	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
Realisasi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
Capaian Kinerja	%	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun Lalu	%	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari tahun lalu	%	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi **Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi** tidak dapat dianalisis karena indikator tersebut pada tahun 2024 tidak digunakan. Indikator tahun sebelumnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan realisasi 56,99 Point dengan tingkat capaian kinerja 96,02%.

2. Kategori Kabupaten Layak Anak



Dari segi realisasi, Kategori Kabupaten Layak tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Kategori Layak Anak tidak menjadi indikator sasaran. Dilihat dari capaian kinerja Kategori Kabupaten Layak Anak tahun 2025 turun sebesar 84,16 % pada kategori Pratama dengan skor 547,06 dari target kategori Madya dengan skor 650,00 dan terealisasi kategori Pratama dengan skor sebesar 547,06

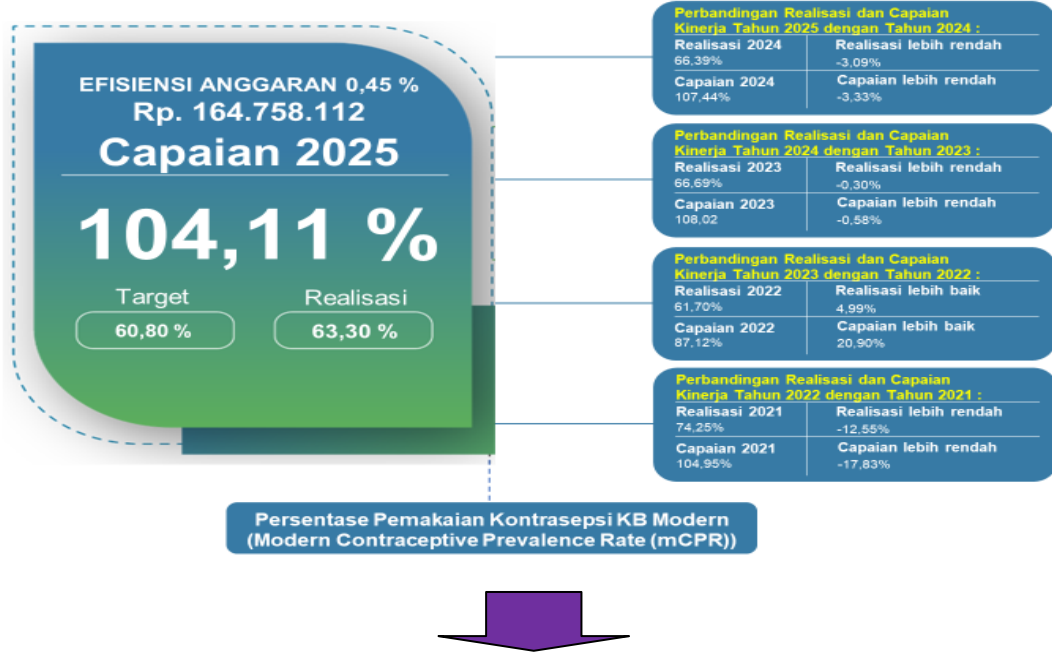
URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Target	Kategori Skor	0,00	0,00	0,00	0,00	Madya 650,00
Realisasi	Kategori Skor	0,00	0,00	0,00	0,00	Pratama 547,06
Capaian Kinerja	Kategori Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	Pratama 84,16
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari tahun lalu	%	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari tahun Lalu	%	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A

2. Target dan Realisasi Kategori Kabupaten Layak Anak



Dilihat pada aspek realisasi, Kategori Kabupaten Layak Anak ini tidak dapat dianalisis karena pada tahun 2024 Kategori Kabupaten Layak Anak tidak dijadikan indikator. Indikator pada tahun 2024 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan realisasi 56,99 Point dengan realisasi Capaian 96,02%.

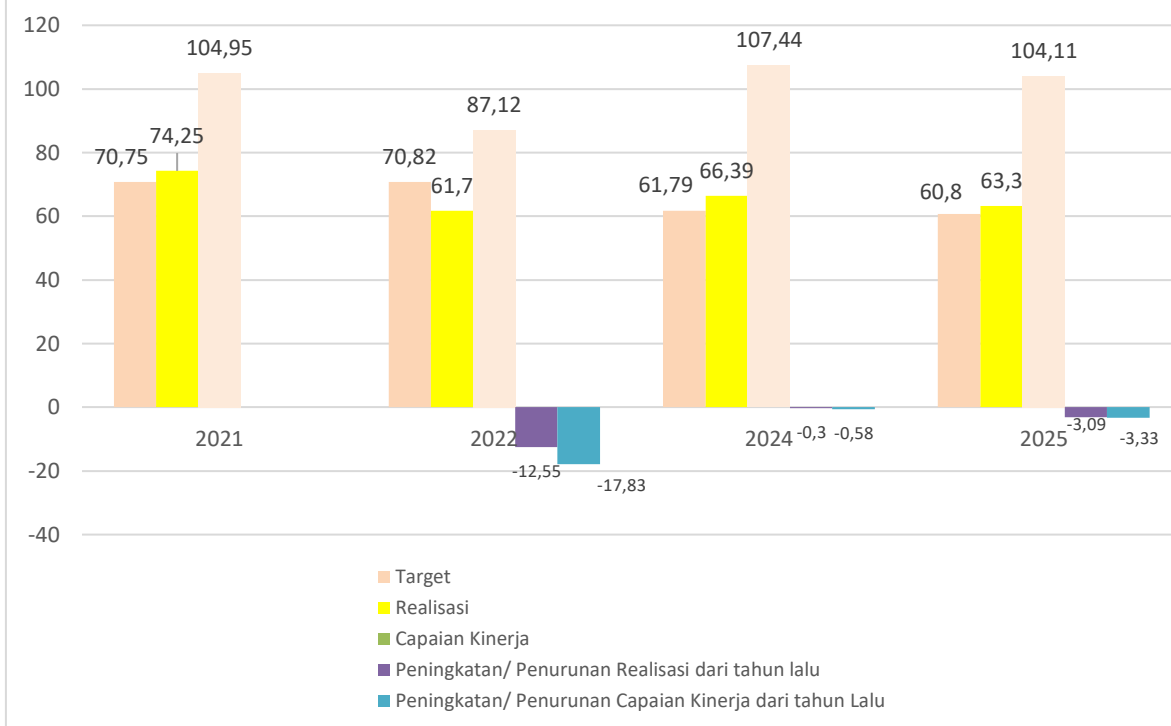
3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))



Dari segi realisasi, **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))** menurun **-3,09 %** dari tahun 2024 sebesar 66,39 % dan tahun 2025 sebesar 63,30 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))** menurun sebesar **-3,33 %** dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 107,44 % dan menjadi 104,11 % pada tahun 2025.

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Target	%	70,75	70,82	61,74	61,79	60,80
Realisasi	%	74,25	61,70	66,69	66,39	63,30
Capaian Kinerja	%	104,95	87,12	108,02	107,44	104,11
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari tahun lalu	%		-12,55	4,99	-0,30	-3,09
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari tahun Lalu	%		-17,83	20,90	-0,58	-3,33

3. Target dan Realisasi Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))** menurun sebesar **3,09 %** dari **Tahun 2024** sebesar **66,39 %** dan Tahun **2025** sebesar **63,30 %**. Dari segi pencapaian kinerja **Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr))** juga mengalami **penurunan** sebesar **3,33%** yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 107,44% sementara pada Tahun 2025 sebesar 104,11%.

Pengukuran Kinerja Rata –Rata Capaian Indikator

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata capaian	Kategori
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB						
1.	Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	Persentase	35,40	37,68	106,44	Tercapai
2.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Persentase	Madya (650,00)	Pratama (547,06)	84,16	Tidak Tercapai
3.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate (mCPR))	Persentase	60,80	63,30	104,11	Tercapai
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran					98,24	Tidak tercapai

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB

1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

URAIAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target (Persen)	35,40	35,93	36,47	37,02	37,57	38,14
Realisasi (Persen)	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan (%)	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra (%)	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Perempuan Usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2025 belum melampaui akhir Rencana Strategis sebesar 98,79 % dari target akhir sebesar 38,14 % telah terealisasi 37,68% pada tahun 2025.

Grapik pie

4. Kategori Kabupaten Layak Anak

URAIAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target (Kategori/Skor)	Madya/ 650,00	Madya/ 675,00	Madya/ 700,00	Nindya/ 725,00	Nindya/ 750,00	Nindya/ 775,00
Realisasi (Kategori/Skor)	Pratama/ 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan (%)	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra (%)	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Kategori Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bogor tahun 2025 belum melampaui akhir Rencana Strategis sebesar 70,59 % dari target akhir sebesar Nindya/775,00 skor telah terealisasi 547,06 skor/Pratama pada tahun 2025.

3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))

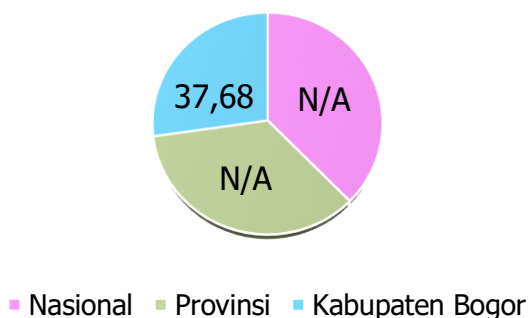
URAIAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	60,80	61,60	62,30	63,10	63,80	64,60
Realisasi	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) Kabupaten Bogor tahun 2025 belum melampaui akhir Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 97,99 % dari target akhir sebesar 64,60 % telah terealisasi sebesar 63,60 % pada tahun 2025.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

1. Perbandingan Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekonomi Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bogor Tahun 2025

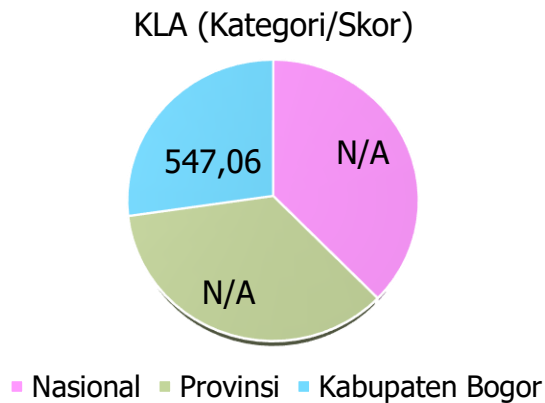
Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekonomi Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bogor Tahun 2025



Tingkat	Realisasi Tahun 2025 (Persen)
Nasional	N/A
Provinsi Jawa Barat	N/A
Kabupaten Bogor	37,68

Dengan melihat grafik dan table diatas, Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2025 belum dapat dianalisis karena indikator ini hanya dihitung di tingkat kabupaten. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi **Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi** tidak dapat dianalisis karena indikator tersebut pada tahun 2024 tidak digunakan indikator tahun sebelumnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan realisasi 56,99 Point dengan realisasi Capaian 96,02 %.

2. Perbandingan Kategori Kabupaten Layak Anak Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bogor Tahun 2025

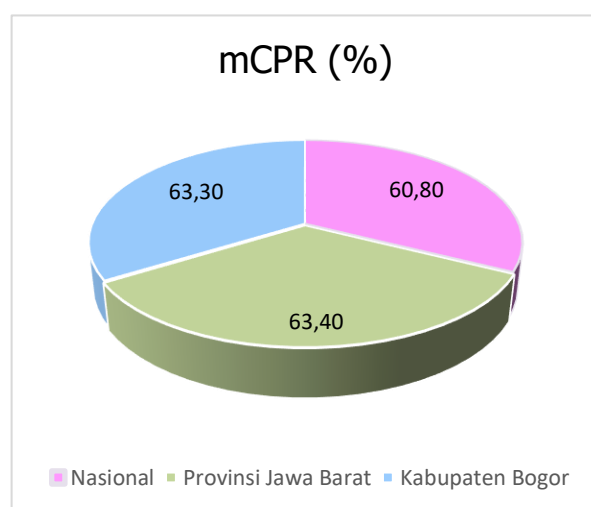


Tingkat	Realisasi Tahun 2025 (Kategori)
Nasional	N/A
Provinsi Jawa Barat	N/A
Kabupaten Bogor	547,06

Kategori Kabupaten Layak Anak tidak bisa dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi karena penilaian Kabupaten Layak Anak hanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Dilihat pada aspek realisasi, Kategori Kabupaten Layak Anak ini tidak dapat dianalisis karena pada tahun Kategori Kabupaten Layak Anak tidak dijadikan indikator. Indikator pada tahun 2024 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan realisasi 56,99 Point.

3. Perbandingan Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bogor Tahun 2025



Tingkat	Realisasi Tahun 2025 (%)
Nasional	60,80
Provinsi Jawa Barat	63,40
Kabupaten Bogor	63,30

Pada tingkat nasional, Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) Kabupaten Bogor tahun 2025 berada di atas realisasi nasional dengan selisih 2,50 %, dimana realisasi nasional tahun 2025 adalah sebesar 60,80 %. Sedangkan pada Tingkat provinsi Jawa Barat Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)) Kabupaten Bogor tahun 2025 berada di bawah realisasi Provinsi Jawa Barat dengan selisih 0,10 % dimana realisasi Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah sebesar 63,40 %.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, atau Peningkatan/ Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatnya keterampilan perempuan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak perempuan dalam meningkatkan potensi diri. peran serta perempuan yang bekerja, hal ini ditandai dengan persentase perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebesar 37,68 % dengan capaian kinerja 106,44 %.

Meningkatnya Persentase Perempuan Usia Kerja Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi ditandai dengan Peningkatan Pasokan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Perubahan Status Sosial dan Kemandirian dan Faktor Pendorong Peningkatan,. Hal ini mencerminkan peningkatan pasokan tenaga kerja perempuan, perluasan akses pendidikan/pelatihan, dan kontribusi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2025 jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 837.107 orang diantaranya terdiri dari karyawan swasta, karyawan Pemerintah dan , Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan meningkatnya persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi :

- 1) Meningkatnya perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dan memberikan fasilitas pendukung seperti adanya daycare atau tempat penitipan anak dan ruang laktasi (sumbernya)
 - 2) Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait
 - 3) Pelaksanaan pelatihan bagi kelompok perempuan kepala keluarga
 - 4) Meningkatnya strata pendidikan perempuan sehingga dapat memperoleh tingkat ekonomi yang lebih baik dan merubah pola pikir atau stigma di masyarakat (sumbernya)
 - 5) Perempuan yang memiliki kesadaran tinggi akan kemandirian finansial
 - 6) Fleksibilitas jam kerja dan memanfaatkan teknologi yang ada
- b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi baik di pedesaan maupun di perkotaan serta mendorong kesetaraan gender dalam akses sumber daya ekonomi antara lain :
- a) Mengadakan sosialisasi tentang Kesetaraan Gender bagi Perangkat daerah terkait, sektor swasta dan lembaga/organisasi masyarakat di bidang ekonomi
 - b) Mengadakan pelatihan teknologi digital dan pemasaran bagi pelaku usaha perempuan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta
 - c) Mengadakan kolaborasi dengan IWAPI untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha perempuan dan para perempuan
 - d) Kerjasama dengan UMKM dalam meningkatkan usaha kecil perempuan melalui pelatihan kejuruan, pembiayaan mikro, pengembangan kewirausahaan dan akses pasar
 - e) Mengadakan pelatihan bagi perempuan kepala keluarga bekerjasama dengan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi ditingkat desa
 - f) Mengadopsi ecommerce dalam pemasaran produk atau jasa

2. Kategori Kabupaten Layak Anak Tahun 2025

Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, menjamin pemenuhan hak-hak anak, dan melindungi mereka dari berbagai ancaman. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, perlindungan yang memadai. Kabupaten disebut Kabupaten Layak anak apabila memenuhi kriteria antara lain :

- Menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang sehat.
- Memiliki kebijakan dan anggaran khusus untuk anak
- Menjamin lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak

Penilaian Kabupaten Layak Anak berdasarkan 24 indikator yang mencakup 5 kluster :

- 1) Hak sipil dan kebebasan,
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
- 5) Hak perlindungan khusus.

Tahun 2025 penilaian Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori Pratama dengan skor 547,06 dari target Madya dengan skor 750,00.

a. Faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Bogor belum mencapai Kabupaten Layak Anak kategori Madya antara lain :

- 1) Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang terstandarisasi
- 2) Tenaga pengajar dan fasilitator yang belum memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak
- 3) Forum anak belum dilibatkan dalam Musrembang Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

- 4) Belum semua Puskesmas, Rumah Ibadah, sanggar seni, Sekolah, Perusahaan-perusahaan swasta memiliki standar ramah anak
 - 5) Belum semua Perangkat Daerah, Kelurahan/Desa, Rumah Ibadah, Perusahaan-perusahaan swasta memiliki ruang bermain anak
 - 6) Terbatasnya anggota gugus KLA yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak
 - 7) Terbatasnya jumlah sekolah yang ramah anak
- b. Upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak Kategori Madya antara lain :
- 1) Penguatan komitmen KLA dengan stakeholder dan mitra kerja
 - 2) Penguatan koordinasi dengan Dinas Arsip dan perpustakaan untuk membentuk PISA
 - 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak bagi tenaga Pengajar dan Fasilitator
 - 4) Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2024 tentang Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan pemberian penghargaan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - 5) Melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak anak
 - 6) Membuat komitmen dengan Gugus Tugas KLA untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Layak Anak
 - 7) Menyusun Kerjasama tentang penguatan KLA dengan mitra kerja
 - 8) Membentuk Sekolah, rumah ibadah, Perusahaan swasta, Puskesmas ramah anak.

3) Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Pencapaian pemakaian kontrasepsi KB Modern (mCPR) di Kabupaten Bogor meliputi :

- 1) Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 2) Dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) tentang Pendataan Keluarga melalui Surat Edaran Bupati Bogor.
 - 3) Tersedianya Cangkupan Data Program gga Kencana
 - 4) Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
 - 5) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK
 - 6) Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB
 - 7) Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - 8) Terbinanya kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
 - 9) Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 10) Mendapatkan sarana pendukung kegiatan program Bangga Kencana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian kontrasepsi KB modern (mCPR) antara lain
- 1) Advokasi kepada stakeholder dan Mitra kerja
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap Petugas Lapangan Keluarga Berencana tentang Program Bangga Kencana dan aplikasi SIGA dan SIRIKA

- 3) Pendataan Keluarga setiap tahun bersama dengan Kader Pos KB Desa, Kader Sub Pos KB Desa , Kelompok Akseptor, RW dan RT di seluruh desa dan kelurahan sebagai bahan perencanaan urusan sub bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Pengajuan sarana pendukung kegiatan program Bangga Kencana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 5) Penguatan kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung program Bangga Kencana.
- 6) Penguatan kerjasama dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan tenaga Kader KB di tingkat Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana kepada masyarakat
- 7) Pertemuan dengan seluruh Petugas lini lapangan KB yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa (Tenaga Penggerak Desa dan Kader KB)
- 8) Pertemuan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas/Fasilitas Kesehatan dan Koordinator tenaga Penyuluh KB terkait Kegiatan Pelayanan KB
- 9) Penyusunan Kerjasama dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
- 10) Penyediaan fasilitas Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan KB
- 11) Pelayanan KB disetiap momentum dan pelayanan KB rutin di seluruh Fasilitas Kesehatan
- 12) Pencatatan dan Pelaporan Rutin hasil pelaksanaan kegiatan Program KKBPK
- 13) Kerjasama dengan SKPD dan lintas sektor dalam penanganan Stunting

- 14) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK Remaja dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 15) Perkuat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program KKBPK kepada kelompok Ketahanan Keluarga
- 16) Pengadaan Sarana media penyuluhan Program Bangga Kencana
- 17) Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pencegahan Stunting.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	+/-	% Realisasi
A.	PENDAPATAN				
B.	BELANJA DAERAH	54.111.644.950	53.544.633.638	567.011.312	98,95
	1. Belanja Operasi	54.474.040.755	58.923.329.050	979.536.618	98,98
	2. Belanja Modal	1.637.604.195	1.606.544.516	31.059.679	98,10

Realisasi anggaran tersebut untuk menunjang 10 Program dan diantaranya untuk mendukung 6 (enam) Program dengan 3 indikator sasaran kinerja. Rincian anggaran 7 (Tujuh) Program DP3AP2KB tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran	No.	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian Kinerja	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)		Efisiensi
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB	1	Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	879.844.018	872.081.020	7.762.998	99,12	0,88
	2	Peningkatan Kualitas Keluarga	257.641.206	252.209.183	5.432.023	97,89	2,11
	Jumlah (Rp)		1.137.485.224	1.124.290.203	13.195.021	98,84	1,16
	3	Pemenuhan Hak Anak	343.624.468	332.230.501	11.393.967	96,68	3,32
	4	Perlindungan Khusus Anak	1.503.964.773	1.489.468.347	14.496.426	99,04	0,96
	Jumlah (Rp)		1.847.589.241	1.821.698.848	25.890.393	98,60	1,40
	5	Pengendalian Penduduk	992.206.958	958.413.591	33.793.367	96,59	3,41
	6	Pembinaan Keluarga Berencana	9.756.012.077	9.670.041.960	85.970.117	99,12	0,88
	7	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	26.227.440.439	26.182.445.811	44.994.628	99,83	0,17
	Jumlah (Rp)		36.975.659.474	36.810.901.362	164.758.112	99,55	0,45
TOTAL (Rp)			39.960.733.939	39.756.890.413	203.843.526	99,49	0,51

Dari tabel diatas, bahwa 7 (Tujuh) Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 sebesar Rp. 39.960.733.939 terealisasi sebesar Rp. 39.756.890.413 atau capaian kinerja sebesar 99,49 % dengan efisiensi sebesar 0,51 % atau setara Rp. 203.843.526.

Analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan tabel diatas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan **Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekonomi** didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Sedangkan dari sisi efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,16 % atau setara dengan Rp. 13.195.021. Adapun efisiensi ini di dapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.137.485.224 dan terealisasi sebesar Rp. 1.124.290.203

- 2) Menurunnya **Kategori Kabupaten Layak Anak** didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Sedangkan dari sisi efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,40 % atau setara dengan Rp. 25.890.393. Adapun efisiensi ini di dapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.847.589.241 dan terealisasi sebesar Rp. 1.821.698.848
- 3) Meningkatnya **Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)** didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Sedangkan dari sisi efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 0,45 % atau setara dengan Rp. 164.758.112. Adapun efisiensi ini di dapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.975.659.474 dan terealisasi sebesar Rp. 36.810.901.362

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB

- 1) Meningkatnya capaian kinerja indikator sasaran Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekonomi sebesar 106,44 % didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga melalui kegiatan-kegiatan sub kegiatan dan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota
 2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota

3. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
4. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/kota
5. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan gender dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/kota



- 2). Menurunnya capaian kinerja Kategori Kabupaten Layak Anak menjadi kategori Pratama dengan skor 547,06 % didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota
 2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota

3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota
4. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota
5. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota



- 3). Meningkatnya capaian kinerja indikator sasaran Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB Modern (mCPR) sebesar 63,30 % didukung oleh Program Pengendalian penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

3. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
4. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
6. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	+/-	% Realisasi
A.	PENDAPATAN				
B.	BELANJA DAERAH	54.111.644.950	53.544.633.638	567.011.312	98,95
	1. Belanja Operasi	54.474.040.755	58.923.329.050	979.536.618	98,98
	2. Belanja Modal	1.637.604.195	1.606.544.516	31.059.679	98,10

Realisasi anggaran tersebut untuk menunjang 10 Program dan diantaranya untuk mendukung 7 Program dengan 3 indikator sasaran kinerja. Rincian anggaran Program DP3AP2KB tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Program	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(+/-) (Rp)	Capaian terhadap target (%)
1.	Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	879.844.018	872.081.020	7.762.998	99,12
2.	Perlindungan Perempuan	367.233.781	361.229.476	6.004.305	98,36
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	257.641.206	252.209.183	5.432.023	97,89
4.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.538.041	95.171.584	2.366.457	97,57
5.	Pemenuhan Hak Anak	343.624.468	332.230.501	11.393.967	96,68
6.	Perlindungan Khusus Anak	1.503.964.773	1.489.468.347	14.496.426	99,04
7.	Pengendalian Penduduk	992.206.958	958.413.591	33.793.367	96,59
8.	Pembinaan Keluarga Berencana	9.756.012.077	9.670.041.960	85.970.117	99,12
9.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	26.227.440.439	26.182.445.811	44.994.628	99,83
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	13.686.139.189	13.331.342.165	354.797.024	97,41
Total (Rp)		54.111.644.950	53.544.633.638	567.011.312	98,95

Anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai 10 program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 sebesar **Rp. 54.111.644.950** terealisasi **Rp. 52.608.826.442** atau tercapai 97,22 % dengan efisiensi sebesar 2,78 % setara dengan **Rp. 1.502.818.508**.

Dari 10 Program diantaranya 7 (Tujuh) Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025 sebesar Rp. 39.960.733.939 terealisasi sebesar Rp. 39.756.890.413 atau capaian kinerja sebesar 99,49 % dengan efisiensi sebesar 0,51 % atau setara Rp. 203.843.526.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dicapai dan terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian prinsip-prinsip good governance dan clean governance tetap diterapkan di tahun selanjutnya dalam upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik.

B. Saran

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja dan Organisasi dan Lembaga Masyarakat.
2. Memperkuat strategi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L)
4. Memperkuat jejaring dengan mitra kerja di semua tingkatan (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan), lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

5. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam setiap kegiatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatkan kualitas Tenaga Penggerak Desa (TPD), Kader Institusi Masyarakat, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Desa, Gugus PPA tingkat Kecamatan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar).
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.